

***DINAMIKA PENGELOLAAN EKOWISATA TAMAN NASIONAL ALAS PURWO
(TNAP)
(ECOTOURISM MANAGEMENT DYNAMIC OF ALAS PURWO NATIONAL
PARK (TNAP)***

Penulis (Nur Imamah), Review (Drs. Joko Mulyono, M.Si)
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: DPU@unej.ac.id

Abstrak

ersoalan sumber daya alam berkisar pada pemanfaatan sedangkan masalah lingkungan hidup berkisar pada persoalan perlindungan dan pelestariannya. Terdapat dua kepentingan berbeda antara pemerintah yang berupaya menjaga dan melindungi sumber daya alam dan masyarakat berupaya memanfaatkannya. Kerusakan lingkungan terjadi akibat kegiatan ekonomi masyarakat yang memanfaatkan kawasan Taman Nasional sebagai mata pencaharian. Untuk menjaga dari kerusakan dilakukan dengan membuka sumber daya alternatif yang melibatkan peran stakeholder. Pengelolaan Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) di desa Sumberasri kecamatan Purwoharjo kabupaten Banyuwangi dilakukan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah melalui Ekowisata. Ekowisata Mangrove Bedul dibentuk tahun 2007, kemudian tahun 2008 dibentuk Badan Pengelola Ekowisata Mangrove Bedul (BPEMB) sebagai pengelola. Pengelola BPEMB diambil dari masyarakat yang dulunya merusak kawasan. Akan tetapi, hanya sebagian yang dilibatkan dan sebagian lainnya dialihkan pada profesi nelayan atau hanya bekerja di Ekowisata. Oleh karena itu munculah dinamika dalam pengelolaannya. Dengan ini peneliti bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis dinamika pengelolaan. Untuk menjelaskan fenomena tersebut peneliti menggunakan teori pertukaran oleh Peter M Blau. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengambilan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan subjek sampling diantaranya pengelola Ekowisata, pihak TNAP dan pemerintah desa. Ada tiga bentuk dinamika yang terjadi sejak tahun 2007 sampai tahun 2013. Pertama, adanya pergantian pengelolaan, kedua, terjadinya perubahan struktur dan ketiga, keluarnya anggota pengelola. Ini disebabkan adanya faktor yang mempengaruhi proses dinamika berupa ketidakkonsistenan pembagian peran, ketidakpuasan pihak luar, pertentangan internal kelompok dan kondisi sosial ekonomi anggota.

Kata Kunci: Ekowisata, dinamika pengelolaan, faktor internal dan eksternal.

Abstract

Natural resources issue revolves around utilization while, on the other hand, environmental issue lies on protection and preservation matters. In this case, there are two contrast interests between the government and society. Government tries hard to protect and preserve natural resources. Yet the society does the opposite act by exploiting the natural resources. Environmental damage appears as the consequence of economic activity done by people that utilize National Park as their livelihood. To keep the environment from further damage, alternative resources are opened up by involving stakeholders. Alas Purwo National Park (TNAP) in Sumberasri village Purwoharjo subdistrict Banyuwangi regency is managed by both the society and government through ecotourism medium. Mangrove Bedul ecotourism was built in 2007. On the following year, in 2008, Mangrove Bedul Ecotourism Management Board (BPEMB) was created as the managers of the place. The managers of BPEMB were taken from people who were once destroyed the area. However, it was just half of them that were involved deeply while the other half were diverted to other less important profession like clerk or fisherman. Hence, dynamics emerged on the management. This research aims to know, describe, and analyze the dynamics of management. Thus Peter M. Blau's theory of exchange is employed to explain the phenomenon. The method uses qualitative approach with using purposive sampling technique to gather the informants. The sampling subjects are the ecotourism managers, the TNAP, and the village government. There are three kinds of dynamics that have happened since 2007 until 2013. The first is about the management replacement. The structural changing becomes the second matter. The last is the dismissal of management members. The dynamics process is influence by several factors, such as: the inconsistent role division, the unsatisfied outside parties, the internal conflicts, and the socio-economic condition of the members.

Keywords: Ecotourism, management dynamics, internal and external factor.

Abstrak

Persoalan sumber daya alam berkisar pada pemanfaatan sedangkan masalah lingkungan hidup berkisar pada persoalan perlindungan dan pelestariannya. Terdapat dua kepentingan berbeda antara pemerintah yang berupaya menjaga dan melindungi sumber daya alam dan masyarakat berupaya memanfaatkannya. Kerusakan lingkungan terjadi akibat kegiatan ekonomi masyarakat yang memanfaatkan kawasan Taman Nasional sebagai mata pencaharian. Untuk menjaga dari kerusakan dilakukan dengan membuka sumber daya alternatif yang melibatkan peran stakeholder. Pengelolaan Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) di desa Sumberasri kecamatan Purwoharjo kabupaten Banyuwangi dilakukan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah melalui Ekowisata. Ekowisata Mangrove Bedul dibentuk tahun 2007, kemudian tahun 2008 dibentuk Badan Pengelola Ekowisata Mangrove Bedul (BPEMB) sebagai pengelola. Pengelola BPEMB diambil dari masyarakat yang dulunya merusak kawasan. Akan tetapi, hanya sebagian yang dilibatkan dan sebagian lainnya dialihkan pada profesi nelayan atau hanya bekerja di Ekowisata. Oleh karena itu munculah dinamika dalam pengelolaannya. Dengan ini peneliti bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis dinamika pengelolaan. Untuk menjelaskan fenomena tersebut peneliti menggunakan teori pertukaran oleh Peter M Blau. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengambilan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan subjek sampling diantaranya pengelola Ekowisata, pihak TNAP dan pemerintah desa. Ada tiga bentuk dinamika yang terjadi sejak tahun 2007 sampai tahun 2013. Pertama, adanya pergantian pengelolaan, kedua, terjadinya perubahan struktur dan ketiga, keluarnya anggota pengelola. Ini disebabkan adanya faktor yang mempengaruhi proses dinamika berupa ketidakkonsistenan pembagian peran, ketidakpuasan pihak luar, pertentangan internal kelompok dan kondisi sosial ekonomi anggota.

Kata Kunci: Ekowisata, dinamika pengelolaan, faktor internal dan eksternal.

Abstract

Natural resources issue revolves around utilization while, on the other hand, environmental issue lies on protection and preservation matters. In this case, there are two contrast interests between the government and society. Government tries hard to protect and preserve natural resources. Yet the society does the opposite act by exploiting the natural resources. Environmental damage appears as the consequence of economic activity done by people that utilize National Park as their livelihood. To keep the environment from further damage, alternative resources are opened up by involving stakeholders. Alas Purwo National Park (TNAP) in Sumberasri village Purwoharjo subdistrict Banyuwangi regency is managed by both the society and government through ecotourism medium. Mangrove Bedul ecotourism was built in 2007. On the following year, in 2008, Mangrove Bedul Ecotourism Management Board (BPEMB) was created as the managers of the place. The managers of BPEMB were taken from people who were once destroyed the area. However, it was just half of them that were involved deeply while the other half were diverted to other less important profession like clerk or fisherman. Hence, dynamics emerged on the management. This research aims to know, describe, and analyze the dynamics of management. Thus Peter M. Blau's theory of exchange is employed to explain the phenomenon. The method uses qualitative approach with using purposive sampling technique to gather the informants. The sampling subjects are the ecotourism managers, the TNAP, and the village government. There are three kinds of dynamics that have happened since 2007 until 2013. The first is about the management replacement. The structural changing becomes the second matter. The last is the dismissal of management members. The dynamics process is influence by several factors, such as: the inconsistent role division, the unsatisfied outside parties, the internal conflicts, and the socio-economic condition of the members.

Keywords: Ecotourism, management dynamics, internal and external factor.

Pendahuluan

Kerusakan lingkungan terbesar yang diakibatkan oleh perilaku manusia terjadi di kawasan pantai. Ini karena Indonesia yang memiliki garis pantai dengan 80.000km

dihuni sekitar 65% penduduk dan sebagian besar penduduk miskin yang memanfaatkan alam disekitar pantai dan laut sebagai sumber mata pencaharian (Soemarwoto, 2001:49). Dengan dipengaruhi pandangan antroposentris yang memusatkan alam sebagai pemenuh kebutuhan manusia

secara mutlak menyebabkan alam selalu dieksploitasi. Antroposentrisme ini merupakan teori filsafat dimana nilai dan moral hanya berlaku pada manusia tanpa melihat manusia sebagai bagian dari alam yang harus berinteraksi dengan alam seperti halnya manusia berinteraksi dengan sesamanya. Teori tersebut merupakan penyebab utama krisis lingkungan yang dewasa ini terjadi (Keraf, 2006:2).

Banyuwangi salah satu kabupaten paling timur dari wilayah Jawa Timur yang memiliki ciri khas geografi dengan kelautan yang membujur dari utara sampai selatan, dengan ciri masyarakat yang hidup dari sumber daya alam tersebut. Terlihat sekitar tahun 1990an masyarakat yang berada di Banyuwangi bagian selatan disekitar kawasan Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) memanfaatkan sumber daya hutan sekitar pantai dan laut sebagai objek mata pencaharian. Padahal TNAP merupakan wilayah konservasi yang sumber daya alamnya dilindungi dan dilestariakan oleh negara, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi saja. Namun masyarakat di desa Sumberasri kecamatan Purwoharjo yang merupakan desa penyangga TNAP tepatnya dibawah naungan Resort Grajakan yang terkenal dengan sebutan TNAP Blok Bedul. Sebagian besar masyarakatnya memanfaatkan sumber daya alam dari TNAP.

Kawasan TNAP yang berupa hutan hujan tropis dengan flora dan fauna beragam berada di daratan Lemarengan dimanfaatkan satwanya untuk dijual dengan pemburuan liar seperti burung dan kijang. Hasil hutan berupa kayu seperti kayu sono dan mahoni untuk bahan bakar ataupun bahan usaha mebel. Kawasan yang dekat Samudera Hindia yang memiliki satwa seperti penyu yang dilindungi dicuri untuk dijual dan satwa laut lainnya yang dimanfaatkan oleh nelayan, ada pula Segara Anakan yang memanjang seluas 300m dengan keanekaragaman satwa laut sebagai mata pencaharian masyarakat nelayan. Hutan mangrove seluas 2.100ha yang juga dimanfaatkan untuk bahan bakar, alat tangkap nelayan dan untuk pertanian. Satwa laut dari hutan mangrove juga dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat sehari-hari.

Puncak dari pemanfaatan ini pada tahun 1998 bersamaan dengan krisis moneter dan keadaan masyarakat sekitar yang miskin menyebabkan penjarahan secara besar-besaran di kawasan TNAP. Kayu mangrove yang disebut kayu tanjang dijadikan kayu bakar masyarakat bahkan untuk dijual hingga jumlah besar, digunakan untuk pengait jaring nelayan, kayu sengan dan mahoni di daratan Lemarengan TNAP dipotong untuk diekspor ke Bali untuk pemasok usaha mebel maupun kayu bakar untuk dijual dan untuk bahan pembuatan sampan dan perahu. Ini menjadikan kawasan tersebut rusak, mengalami kekeringan air dan juga berkurangnya satwa laut untuk penghasilan nelayan (Yunita, 2012) dalam (<http://sains.kompas.com/read/2012/07/06/05123280/Bedul.Penangkal.Tsunami>).

Kondisi seperti ini harus ada upaya menjaga kawasan Taman Nasional karena fungsinya sebagai penyeimbang lingkungan hidup. Jika tidak akan ada kerusakan daya dukung lingkungan yang berakibat pada munculnya bencana alam. Kerusakan akibat perilaku manusia seperti ini merupakan faktor eksternal terjadinya bencana alam (Dwi Susilo, 2009:31-32). Untuk itu perlu upaya menggunakan konsep yang sesuai dengan kepentingan masing-masing

pihak, baik pemerintah dengan kepentingan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dan masyarakat sekitar kawasan yang memiliki kepentingan memanfaatkan sumber daya alam kawasan Taman Nasional. Dengan mengusung nama pembangunan keberlanjutan ekologis yang luas dimana kelayakan hidup dilakukan secara ekologis, sosial budaya dan ekonomi yang proporsional dengan mengedepankan prinsip berbasis masyarakat yang mengutamakan keadilan baik dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan (Naess dalam Keraf, 2006:188).

Mengemban prinsip tersebut pada tahun 2007 pihak dari Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) bersama pemerintah desa melakukan komitmen dengan mengubah perilaku masyarakat agar tidak merusak alam sebagai dampak dari aktivitas perekonomian masyarakat. TNAP dan pemerintah desa Sumberasri mengajak masyarakat mewujudkan kesepakatan untuk memanfaatkan dan melestarikan alam dengan melakukan kolaborasi. Kolaborasi tersebut dibangun dengan melakukan berbagai kegiatan pengelolaan TNAP bersama melalui Ekowisata. Ekowisata dengan nama Ekowisata Mangrove Bedul ini dicanangkan pada tahun 2007 dengan dibentuknya Badan Pengelolaan Ekowisata Mangrove Bedul (BPEMB) pada tahun 2008, Ekowisata ini mulai berjalan pada tahun 2009 dan puncak aktivitasnya pada tahun 2010 yang mana pengelolaannya secara langsung melibatkan pihak TNAP, pemerintah desa dan juga masyarakat yang dahulunya menjadi perambah hutan. Masyarakat yang menjadi pengelola Ekowisata ini hanya sebagian kecil dimasukkan dalam BPEMB dari masyarakat yang dahulunya menjadi perambah hutan dan yang lainnya melakukan alih profesi sebagai nelayan dan bekerja di Ekowisata.

Pengolaan TNAP yang dilakukan dengan dua cara tersebut tidak dilakukan dengan sinergitas yang mensejajarkan peran dan kepentingan masing-masing pihak baik TNAP, pemerintah desa dan masyarakat (Susdiyanti, 2008). Sebab dalam pengolaan Ekowisata hanya sebagian menempati posisi BPEMB yaitu dari masyarakat yang dulunya perambah hutan dan masyarakat yang memiliki peran besar di desa. Bahkan masyarakat yang berada di posisi BPEMB dipilih langsung oleh pengelola utama Ekowisata. Sedangkan masyarakat lainnya hanya dijadikan pekerja atau karyawan bukan masuk pada pengurus utama BPEMB tetapi hanya mengelola sebagai penjual makanan dengan membuka warung di Ekowisata, menjadi tukang perahu, berdagang asongan dan menjadi tukang parkir. Ekowisata ini bahkan pada tahun 2013 berubah menjadi ijin wisata yang dimiliki oleh desa Sumberasri di bawah Badan Usaha Milik Desa Sumberasri (BUMDES) yang dahulunya merupakan Ekowisata sebagai pemberdayaan masyarakat dengan pengolaan kolaborasi sebagai usaha mencegah perusakan kawasan TNAP. Sekarang menjadi usaha wisata alam yang memberikan pendapatan bagi desa Sumberasri dan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diberikan pada kawasan TNAP.

Ini menjadi satu pergeseran pola pencegahan terhadap kawasan beralih pada kegiatan ekonomi. Pengelolaan Ekowisata TNAP yang melibatkan pihak TNAP, pemerintah desa, BPEMB dan masyarakat harus berjalan secara sinergis dan simetris dengan mengedepankan

peran dan keuntungan yang seimbang (Ostrom dalam Bappenas, 2004:17). Jika tidak, akan tercipta ketimpangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan tersebut karena didalamnya pasti ada kepentingan sub-sub kelompok diatas kepentingan kelompok besar dalam pengelolaan Ekowisata. Adanya kondisi ini maka peneliti ingin meneliti dinamika pengelolaan Ekowisata Taman Nasional Alas Purwo di desa Sumberasri kecamatan Purwoharjo kabupaten Banyuwangi.

Tinjauan Pustaka

Kelompok sosial atau *social group* menurut R.M MacIver dan Charles H. Page (dalam Soekanto, 2009:101) adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, karena adanya hubungan diantara mereka. Hubungan tersebut menyangkut hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Kelompok sosial tidak bisa dihindari adanya suatu perkembangan dan perubahan karena kelompok sosial bersifat dinamis. Hal ini yang dimaksud dengan dinamika kelompok sosial, dimana kelompok sosial mengalami perubahan sebagai akibat dari formasi atau reformasi dari pola-pola didalam tersebut akibat pengaruh dari luar (Soekanto, 2009:146).

Dinamika kelompok merupakan kajian terhadap kekuatan-kekuatan yang terdapat didalam maupun di lingkungan kelompok yang akan menentukan perilaku anggota kelompok dan perilaku kelompok yang bersangkutan, untuk bertindak atau melaksanakan kegiatan-kegiatan demi tercapainya tujuan bersama yang merupakan tujuan kelompok tersebut. Dinamika kelompok akan mencakup faktor-faktor yang menyebabkan kelompok hidup, bergerak, aktif dan efektif dalam mencapai tujuannya (Mardikanto yang dikutip Purwanto, 2011 dalam <http://repository.lpb.ac.id/bitstream/handle/123456789/47905/E11spu.pdf>). Dinamika kelompok sosial dalam pengelolaan Ekowisata TNAP ini dilihat dari teori pertukaran Blau.

Teori pertukaran merupakan teori yang dikemukakan oleh Peter M Blau, teori pertukaran yang dikemukakan oleh Blau bisa dilihat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk kelompok sosial atau organisasi. Peter M Blau melihat pertukaran dalam organisasi formal. Disini Blau melihat bahwa kehidupan sosial individu terdapat hubungan yang bersifat *given* yang mana merupakan asal-usul struktur sosial. Dalam kehidupan yang penuh dengan *given* ini terdapat saling pertukaran antar individu, yang menciptakan individu ditarik dalam sebuah asosiasi dalam kehidupan sosialnya.

Perilaku manusia yang dibimbing oleh prinsip pertukaran sosial ini mendasari pembentukan struktur dan lembaga sosial. Sehingga manusia dalam kelompok ingin masuk dalam sebuah asosiasi karena ingin memperoleh ganjaran sosial tersebut. Hal ini dimaksudkan bahwa individu ingin masuk dalam sebuah asosiasi untuk mendapatkan ganjaran baik itu ganjaran ekstrinsik berupa uang atau barang, bahkan individu juga ingin mendapatkan ganjaran intrinsik berupa kehormatan atau penghargaan, yang dapat kedua ganjaran tersebut akan menaikkan status

sosial dalam masyarakat. Dengan ini maka dalam kelompok atau asosiasi individu akan memberikan nilai bagi kelompok. Berarti bahwa dalam kelompok setiap individu melakukan pemberian nilai bagi kelompok baik berupa sumber daya yang dimiliki oleh individu tersebut, baik itu berupa uang, tenaga, pikiran atupun ide dan gagasan yang mampu bernilai bagi kelompok tersebut. Pemberian nilai yang berbeda ini akan menciptakan perbedaan status didalamnya. Perbedaan status ini akan menciptakan stratifikasi dalam sebuah kelompok (Blau dalam Poloma, 1992:84). Pemberian nilai terhadap kelompok ini dilakukan dengan melakukan tindakan pertukaran antar anggotanya baik mereka yang memiliki nilai dengan sumber daya besar atau kecil.

Blau mengakui pertukaran tidak selamanya simetris dan berdasarkan pertukaran sosial yang seimbang. Hubungan antar pribadi bisa bersifat timbal-balik atau sepihak. Hubungan yang bersifat simetris ini akan menerima ganjaran sesuai dengan yang diberikan maka disebut hubungan pertukaran. Didalam hubungan yang stratifikasi pertukaran dikatakan menguntungkan bagi para anggota yang berkedudukan tinggi atau rendah. Hal ini akan menimbulkan hubungan pertukaran yang tidak seimbang karena akan ada pihak yang memperoleh keuntungan sepihak karena adanya stratifikasi tersebut. Keuntungan sepihak ini akan menciptakan penyimpangan pada sub kelompok. Blau melihat dalam kehidupan yang kompleks ini pengendalian diri yang personal adalah yang bersifat interpersonal dan sumber dasar untuk membendung itu adalah kekuasaan (Blau dalam Poloma, 1992:85).

Hubungan ketergantungan dan kekuasaan sebagai dasar untuk menganalisa ketimpangan yang terdapat di dalam kelompok dapat diperjelas dengan beberapa tindakan dari individu. Individu yang membutuhkan pelayanan orang lain harus memberi alternatif seperti yang dinyatakan oleh Emerson yang dikutip oleh Blau (dalam Zeitlin, 1995:128).

1. Ia dapat memperoleh pelayanan yang sama dari orang lain sehingga hubungan dengan lainnya masih bersifat hubungan timbal balik yang sama.
2. Ia dapat memperoleh pelayanan yang sama dimana-mana.
3. Ia dapat menekan yang lain untuk memberikan pelayanan, hal ini merupakan hasil dari dominasinya terhadap yang lain.
4. Ia bekerja tanpa mengharapkan pelayanan seperti itu atau ia menemukan beberapa penggantinya.

Adanya tindakan tersebut diatas maka mereka yang memiliki kekuasaan akan mampu mempertahankan dan menjaga kekuasaannya karena tindakan tersebut akan menciptakan kepatuhan bagi mereka yang berada pada posisi dikuasai. Dan mereka yang memiliki posisi yang dikuasai akan menjadi patuh terhadap penguasa jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan seperti diatas. Kepatuhan tersebut akan menciptakan persediaan pelayanan mereka sesuai dengan kepatuhan mereka. Maka penguasaan akan selalu memperoleh keuntungan besar dan yang dikuasai akan memperoleh keuntungan sedikit. Ini posisi dimana terjadi ketimpangan. Karena kekuasaan itu ada akibat adanya pertukaran yang timpang. Bagi penguasa yang merupakan penyedia mereka harus mampu bersikap wajar terhadap keuntungan yang mereka peroleh atas pertukaran pelayanan tersebut dan harus

mampu merintanginya penyedia lain dalam kegiatan pelayanan yang sama. Sehingga diferensiasi kekuasaan dilihat dari hasil barang-barang yang langka (Blau dalam Poloma, 1992:88).

Blau (dalam Ritzer, 2010:369) juga memberikan 4 kondisi yang dilakukan oleh anggota dalam kelompok atau organisasi dengan adanya pertukaran, 1) menolak untuk menerima pemberian meskipun tidak mendapatkan apa-apa, 2) berusaha memiliki sumber lain yang nilainya sama agar ada saling ketergantungan, 3) mencari alternatif lainnya sehingga ada peluang saling ketergantungan, 4) berupa kekerasan untuk memaksa atau merampas dari pihak lainnya. Dari kondisi ini akan terjadi kekuasaan yang memaksa yang dilakukan oleh penyedia sehingga akan terjadi pertentangan dan bahkan perlawanan dari mereka yang berada pada posisi yang dikuasai. Dalam sebuah pertukaran dalam kelompok terdapat:

a. Keabsahan kekuasaan dalam kelompok.

Dalam sebuah kelompok pelaksanaan kekuasaan yang tidak berlebihan dan memberikan keuntungan yang setimpal pada kepatuhannya terhadap penguasa. Kekuasaan seperti ini akan memberikan keabsahan kekuasaan dan wewenang dari perintah-perintahnya. Namun jika kekuasaan yang ada dalam kelompok tersebut dilakukan dengan cara menindas atau menghisap mereka yang berada dalam kepatuhan, maka ini akan menimbulkan penolakan ataupun perlawanan. Walaupun dalam in-group dapat memiliki kesamaan nilai-nilai dan norma-norma, tetapi norma-norma mereka bersifat khusus dapat mengalami konflik. Dengan demikian suatu kelompok bisa saja menyetujui tujuan-tujuan yang bersifat khusus, tetapi tujuan tersebut mungkin bertentangan dengan tujuan sub-kelompok lainnya (Blau dalam Zeitlin, 1995:128).

b. Legitimasi kekuasaan

Untuk melaksanakan usaha kolektif untuk mencapai tujuan bersama mereka membentuk organisasi untuk membagi pekerjaan dan mengkoordinir aktivitas. Kekuasaan dipergunakan untuk mengatur dan mengkoordinir aktivitas manusia. Tetapi kekuasaan itu bukanlah sumber sederhana tetapi ada dominasi maka disana ada sumber konflik. Dominasi ini akan melahirkan resistensi, oposisi bahkan revolusi (Blau dalam Zeitlin, 1995:130). Oleh sebab itu mereka yang berada dalam posisi penguasa harus memberikan tuntutan yang sesuai dengan apa yang diberikan kepada bawahan jika atasan meminta hal yang berlebihan maka akan terjadi sumber konflik dan tugas penguasa menekan kepatuhan disini.

c. Eksploitasi

Menurut Blau oposisi terhadap kekuasaan muncul, ketika mereka yang diperintah merasakan adanya eksploitasi dan penekanan. Jika seseorang penguasa memaksa bawahannya dan memanfaatkan kekuasaannya. Blau menyatakan bahwa definisi norma sosial itu tergantung atas apakah permintaan itu terlalu berlebihan dibandingkan dengan jasa yang diberikan sehingga penguasa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menggunakan kekuasaannya. Prinsip yang muncul disini adalah jika pihak

yang diperintah itu merasa bahwa norma sosial itu jujur, maka mereka akan mendukung terhadap pemimpinnya, sehingga akan menguatkan dan melegitimasi kekuasaannya. Jika keuntungan itu memenuhi harapan-harapan pihak yang diperintah maka mereka akan tidak akan pernah merasa dieksploitasi dan akan mendukung legitimasi kelompok penguasa. Namun jika penguasa telah memonopoli sumber kekuasaan tidak sesuai atau melebihi norma kejujuran dan keadilan sosial maka yang diperintah akan lolos dari kekuasaan dan bahkan menentangnya. Blau juga membahas bahwa dominasi merupakan hasrat memunculkan suatu ketimpangan (Blau dalam Zeitlin, 1995:141-142). Menurut teori pertukaran Blau (dalam Ritzer, 2011:369) bahwa proses dalam kelompok ataupun organisasi terjadi dengan empat tahap yang dimulai dari antar pribadi ke struktur sosial hingga ke perubahan sosial. Langkah 1, pertukaran atau transaksi antar individu yang meningkat ke langkah 2, diferensiasi status dan kekuasaan yang mengarah ke langkah 3, legitimasi dan pengorganisasian yang menyebarkan bibit ke langkah 4, oposisi dan perubahan.

Metode Penelitian

Peneliti dalam penelitiannya menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif mencari fenomena dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan riil dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi dan bagaimana terjadinya. Dengan memberikan deskriptif yang mendalam mengenai fenomena dengan menggunakan teori pertukaran dari Peter M Blau. Penelitian dilakukan di desa Sumberasri khususnya dusun Bloksolo, kecamatan Purwoharjo kabupaten Banyuwangi. Dusun Bloksolo adalah dusun yang letaknya paling dekat dengan kawasan TNAP, masyarakatnya juga yang memanfaatkan paling besar TNAP, masyarakat yang menjadi pengelola Ekowisata sebagian besar berasal dari dusun ini bahkan Ekowisata tersebut terletak di dusun ini. Peneliti menggunakan *purposive sampling* dengan beberapa kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, informan secara acak dipilih sesuai kriteria, baik informan pokok maupun tambahan. Pengumpulan data penelitian melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan studi pustaka. Dalam proses keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi teknik dengan mengecek data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dalam analisis data, peneliti melakukan pengkategorian data, menginterpretasi data, memaparkan hasil penelitian, dianalisis baru kemudian dapat mengambil suatu kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Blau (dalam Poloma, 1992:97-98) bahwa dalam sebuah kelompok sosial terdapat perbedaan yang berhubungan dengan jangkauan terhadap sumber-sumber yang langka. Keadaan tersebut diikuti dengan adanya alokasi kepemimpinan atas dasar kedudukan terhormat yang disediakan oleh perbedaan itu. Karena perbedaan itu menciptakan stratifikasi yang memposisikan individu pada

posisi yang dipimpin atau yang memimpin. Dengan demikian mereka yang menjadi para pemimpin dapat membuat penetapan tugas dengan meningkatkan proses diferensiasi melalui pembagian kerja. Diferensiasi ini tidak bersifat statis. Disinilah letak dinamika dalam kelompok sosial tersebut.

Sehingga ketika kekuasaan individu yang dominan dapat dilaksanakan dengan adil, sehingga orang lain merasa beruntung untuk merasa dibawah perlindungan mereka. Akan tetapi kekuasaan dapat juga menjerumus pada penghisapan. Bilamana orang terpaksa tunduk pada kekuasaan yang bersifat menghisap dan tidak adil tersebut, keadaan seperti ini akan memunculkan oposisi yang menentang kekuasaan yang dominan, disinilah akan muncul bibit perkembangan konflik. Yang mana akan menciptakan suatu perubahan pada kelompok tersebut baik itu perubahan yang mengarah pada keadaan yang progres ataupun sebaliknya. Keadaan seperti ini merupakan dsituasi inamika yang terjadi dalam sebuah kelompok.

Analisis Pengelolaan Ekowisata

1. Dinamika Pengelolaan Ekowisata Taman Nasional Alas Purwo (TNAP).

a. Perubahan Pengelolaan Ekowisata Dari Kolaborasi dengan TNAP menjadi Ijin Usaha Wisata Milik Desa.

Ekowisata TNAP yang dinamakan Ekowisata Mangrove Bedul berdiri pada tahun 2007, mulai berjalan pada tahun 2009 dan mengalami puncak pengembangan pada tahun 2010 sebagai pusat wisata di Banyuwangi selatan. Berjalannya Ekowisata yang semakin pesat malah menjadi permasalahan tersendiri dalam pengelolaannya. Terjadi ketidaksepahaman antara pengelola Ekowisata BPEMB dengan TNAP. TNAP mengkritik kinerja BPEMB dan pemerintah desa yang tidak menepati perjanjian dari kolaborasi awal, yaitu membuat rencana dan laporan kegiatan perbulan sekali atau pertahun sekali dalam kegiatan Ekowisata kepada TNAP. Kritik TNAP juga pada pengelolaan yang tidak memberikan batasan jumlah kunjungan wisata yang semakin banyak, ini dianggap mengganggu kelestarian kawasan. Karena wisatawan lebih banyak mengunjungi objek wisata pantai selatan dengan menelusuri kawasan Taman Nasional. Ini akan mengancam kelestarian kawasan TNAP dengan masuknya wisatawan tanpa ada batasannya. Kedua kegagalan pengelola ini menjadikan pihak TNAP menetapkan sesi buka tutup pada kawasan per 3 bulan sekali dan lebih mengawasi kinerja dari pengelola. Karena jika tidak dilakukan akan merusak kawasan TNAP dan tidak ada kontribusi nyata pengelola terhadap upaya konservasi pada kawasan, ini kekecewaan TNAP terhadap pengelola.

Namun dari pihak pengelola kesepakatan sesi buka tutup ini tidak ada pada perjanjian kolaborasi. Bahkan peran Ekowisata dalam konservasi sudah dianggap 90% berhasil dengan beralihnya kegiatan masyarakat pada kawasan dan juga kontribusi Ekowisata bagi kawasan baik melalui dana konservasi ataupun kegiatan konservasi lainnya. Ini menjadi kekecewaan pengelola kepada TNAP yang dianggapnya sebagai penghalang kinerja pengelola dan pemerintah desa yang berjalan lebih dahulu dibandingkan pihak TNAP.

Bahkan kegiatan yang menyangkut Ekowisata sebagai kawasan wisata lebih melibatkan pengelola dan pemerintah desa dibandingkan dengan pihak TNAP. Ini mengakibatkan pertentangan diantara keduanya dalam pengelolaan kolaborasi tersebut.

Ekowisata ini kemudian pada tahun 2013 berubah menjadi ijin usaha yang dimiliki oleh desa yang diajukan oleh desa kepada pihak TNAP. BPEMB menjadi pengelola mutlak yang menangani Ekowisata yang dikelola dibawah naungan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Lohjinawi desa Sumberasri. BPEMB merupakan subbagian dari BUMDES Lohjinawi. Dengan berubahnya Ekowisata ini menjadi ijin usaha maka kekuasaan penuh berada pada pengelola Ekowisata dan pemerintah desa. Dalam hal ini pihak BPEMB sebagai badan yang mengelola Ekowisata dan pemerintah desa sebagai pengelola BUMDES yang merupakan badan yang mengelola usaha wisatanya tersebut. Sehingga perencanaan sampai pelaksanaan dilakukan oleh kedua pihak.

b. Perubahan Struktur Pengelola Ekowisata Mangrove Bedul.

Dinamika lain dalam Ekowisata adalah terjadinya pergantian kepengurusan yang ada dalam BPEMB, dari tahun 2011 sampai tahun 2013 telah berganti sebanyak tiga kali kepengurusan, padahal kepengurusan ini tidak dilakukan dengan masa jabatan. Pergantian struktur kepengurusan pengelola Ekowisata didasarkan berbagai alasan baik itu pengaruh dari luar maupun dalam kelompok. Sehingga banyak pengelola yang keluar dari Ekowisata dan mempengaruhi struktur kepengurusan BPEMB. Pergantian struktur kepengurusan disebabkan karena banyaknya pengelola yang keluar dari Ekowisata mengurangi jumlah keanggotaan dalam BPEMB. Bahkan ini mengakibatkan adanya peran ganda yang dipegang oleh setiap posisi di bagian kepengurusan BPEMB. Terdapat juga pergantian nama pada setiap subbagian dalam struktur pengelolaan. Subbagian dalam struktur BPEMB juga mengalami penyusutan dari struktur pengelolaan Ekowisata tahun 2011 sampai tahun 2013. Ini mengindikasikan juga bahwa semakin berkurangnya anggota pada pengelolaan Ekowisata berdampak pula pada struktur BPEMB.

c. Banyak Pengelola Ekowisata Yang Keluar Dari Pengelolaan Ekowisata.

Keanggotaan BPEMB yang semakin berkurang akibat banyak yang keluar diikuti banyak pula pengelola Ekowisata yang hanya sebagai karyawan atau pekerja juga keluar dari Ekowisata, baik sebagai tukang perahu dan menjual makanan juga mengalami berbagai kondisi sehingga banyak yang keluar dari pengelolaan. Sebab mereka yang menjadi BPEMB utama merupakan masyarakat yang awal pembentukan Ekowisata memiliki kontribusi besar dengan menyumbangkan dana dan tenaga atau menggunakan swadaya sendiri sebagai dana awal pembentukan Ekowisata. Mereka juga merupakan masyarakat yang dapat dikatakan memiliki peran penting di desa dan memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat lain di desa Sumberasri bahkan desa tetangga. Dengan status yang dimiliki mereka dimasukkan dalam BPEMB yang mendapatkan gaji langsung dari dana

operasional Ekowisata dan mereka juga dilibatkan aktif dalam program Ekowisata mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Sehingga mereka yang berada pada status pekerja tersebut mendapatkan gaji dari kegiatan bekerja mereka sendiri bukan gaji dari Ekowisata padahal mereka juga menyumbangkan tenaga dalam pengelolaan Ekowisata dari awal terbentuk..

Ini menjadikan adanya diskriminasi pengelolaan bahwa masyarakat yang sama-sama memberikan kontribusi bagi Ekowisata ditempatkan pada posisi yang berbeda. Diskriminasi ini terjadi akibat adanya ketimpangan ganjaran yang didapat dari proses pertukaran di dalam kelompok. Dalam Ekowisata ini terjadi pertukaran dimana masyarakat yang dahulunya menjadi perambah hutan berhenti dari merambah hutan untuk menjadi pengelola Ekowisata, kegiatan mereka bahkan dengan memberikan kontribusi tenaga dan uang untuk pembukaan Ekowisata pada awal berdirinya. Namun pemberian swadaya ini banyak dilakukan bagi mereka yang sekarang menjadi anggota BPEMB dan mereka juga yang menjadi pengelola lama sehingga mereka mendapatkan posisi tersebut dari nilai yang besar yang mereka pertukarkan pada Ekowisata. Namun berbeda dengan yang berstatus pekerja, mereka memperoleh posisi hanya sebagai pekerja, memperoleh gaji dari usaha mereka dan masih diberlakukan retribusi untuk Ekowisata, tetapi Ekowisata semakin menurun kinerjanya akibat pertentangan dalam pengelolaannya yang berdampak pada penurunan kunjungan yang merugikan bagi pengelola yang statusnya hanya pekerja dan karyawan. Sehingga banyak pengelola yang menjadi pekerja dan karyawan yang keluar dari Ekowisata. Sebab hasil yang mereka dapat tidak begitu besar.

2. Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Dinamika Pengelolaan Ekowisata.

a. Ketidakkonsistenan Pembagian Peran Dalam Pengelolaan Ekowisata Antara TNAP Dan Pengelola BPEMB.

Pengelolaan Ekowisata dilakukan dengan menetapkan peraturan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang melakukan kolaborasi, bahwa harus ada himbauan terhadap pengunjung yang melakukan aktivitas di pantai selatan yang juga menjadi objek wisata di Ekowisata ini. Himbauan tersebut seharusnya dilakukan melalui pengarah secara lisan ataupun himbauan secara tertulis yang jelas berdasarkan fungsi Ekowisata yaitu upaya konservasi, yang dilakukan oleh pihak pengelola. Dari ini pengelola hanya memberikan prasarana peringatan untuk tidak berenang, itupun papan peringatan yang tidak jelas, sehingga mengakibatkan ada kematian wisatawan lokal pada tahun 2011. Ini menjadi ketidakkonsistenan peran yang seharusnya dilakukan oleh pihak Ekowisata sebagai pengelola untuk memberikan peringatan secara jelas.

Faktor lainnya pengelola tidak bisa meminimalisir kunjungan wisatawan yang masuk, karena wisatawan dengan jumlah banyak seharusnya dibatasi menyangkut dengan kelestarian alam TNAP. Kritik ini yang disampaikan pihak TNAP kepada pengelola. Ini dianggap sebagai ketidakkonsistennya kesepakatan awal baik pengelolaan dan pihak TNAP. Karena kesepakatan awal tidak ada batasan

untuk kunjungan selama itu tidak merusak kawasan. TNAP kemudian memberlakukan sistem buka tutup kunjungan wisata, yang dilakukan per 3 bulan sekali. Dari sini terlihat jika peran kedua pengelola tidak konsisten dalam mengelola Ekowisata dan pada akhirnya menciptakan pertentangan.

Adanya ketidakkonsistenan pembagian peran antara keduanya menjadikan kekecewaan yang megarah pada kondisi kontravensi. Banyak berkembang isu dan desas-desus terjadi antara pengelola dan pihak TNAP. Kondisi kontravensi bahkan dilakukan dengan adanya desas-desus baik yang dilakukan dari pihak pengelola maupun kepala desa terhadap kinerja TNAP ataupun sebaliknya. Isu-isu mengenai ketimpangan kekuasaan dan peran bahkan berkembang dalam pengelolaan Ekowisata, sebab selama ini pihak pengelola dan pemerintah desa menganggap bahwa kinerja TNAP yang lamban dalam mempromosikan Ekowisata. Bahkan yang menjadikan Ekowisata semakin berkembang pesat adalah pemerintah desa dan pengelola, sehingga ada ketimpangan peran, akses dan keuntungan yang besar pada pihak pengelola dari pada TNAP. Ini yang memicu pihak TNAP untuk melakukan pengawasan bahkan buka tutup areal wisata. Usaha menjaga kelestarian tersebut sebagai upaya konservasi kawasan yang tidak dilakukan secara baik oleh pengelola, namun kondisi tersebut dianggapnya sebagai usaha memperkecil kinerja pengelola karena adanya ketimpangan tadi.

Pihak TNAP merasa kecewa terhadap pengelola Ekowisata BPEMB yang hanya melakukan kegiatan Ekowisata untuk menarik keuntungan besar tanpa adanya koordinasi dengan TNAP. Seperti kurangnya upaya konservasi secara maksimal bahkan tidak ada pembuatan rencana dan laporan pada TNAP. Padahal pembukaan Ekowisata ini harus menciptakan keuntungan bagi TNAP sebagai yang melindungi kawasan dan bagi pengelola yang memanfaatkan kawasan untuk ekonomi masyarakat. Ketidakkonsistenan peran masing-masing ini menciptakan kondisi ketidakjelasan dan ketimpangan antara keduanya. Kontravensi ini timbul pada tahun 2011. Untuk mengurangi kontravensi harus ada peran jelas antara keduanya, sehingga kontravensi ini berakhir pada tahun 2012. Dengan perkembangan kawasan tersebut pada tahun 2013 berubah menjadi ijin usaha dibawah naungan desa.

Dalam teori Blau bahwa didalam hubungan pertukaran tidak selamanya akan terjadi hubungan yang simetris. Pertukaran yang dilakukan dalam kelompok akan terjadi ketidakseimbangan ganjaran yang didapat, karena dalam kelompok pasti ada aktor yang mampu mengendalikan sumber daya, mereka yang mampu mengendalikan sumber daya dengan nilai yang mereka berikan secara besar akan memperoleh ganjaran yang lebih dari mereka yang hanya memberikan nilai yang sedikit (Blau dalam Poloma, 1992:84-85). Sehingga dalam kelompok tersebut yang memberikan nilai paling besar akan memperoleh keuntungan lebih besar juga. Ini yang terjadi dalam pengelolaan antara TNAP, pemerintah desa dan pengelola Ekowisata. Nilai yang diberikan antara TNAP dan pemerintah desa dalam pengelolaan dilakukan dengan pertukaran nilai diantara mereka, pemerintah desa beserta pengelola mampu membendung kerusakan dengan melakukan Ekowisata dan TNAP menjadikan kawasannya

sebagai Ekowisata. Mereka melakukan pertukaran disini dalam kolaborasi pengelolaan.

Ketika ada yang dipertukarkan pasti ada sumber daya yang lebih yang didapat dalam proses pertukaran, pemerintah desa beserta pengelola yang mendapatkan ganjaran lebih seperti dana ekowisata, promosi wisata, kegiatan pelestarian dari pihak luar. Namun tidak diimbangi dengan perannya yang maksimal dalam menjaga kawasan. Sedangkan pihak TNAP yang memberikan ijin kawasannya berada dibelakang, hanya sebagai regulasi, tanpa peran keseluruhan dalam pengelolaannya, dikesampingkannya peran TNAP disini menjadikan Ekowisata hanya mencari keuntungan saja. Padahal keduanya memiliki nilai besar. Muncul ketimpangan ganjaran dan menimbulkan pertentangan diantara keduanya. Ini menyebabkan berbagai situasi kontravensi antara pihak TNAP dan pemerintah desa sebagai salah satu dampak yang ditimbulkan karena adanya ketimpangan tersebut. Sumber daya lebih dikontrol oleh pemerintah desa dan pengelola sehingga keuntungan lebih didapat dari pihak pemerintah desa dan pengelola lewat kegiatan wisata yang diajukan pemerintah desa dan pengelola. Untuk memberikan solusi atas ketidakseimbangan pertukaran dan untuk meredam pertentangan. Blau menyatakan bahwa kekuasaan merupakan salah satu alternatif membendung pertentangan tersebut. Kekuasaan itu diciptakan oleh pemerintah desa dan pengelola dengan menjadika Ekowisata tersebut menjadi ijin usaha wisata milik desa. Dengan ini Ekowisata menjadi mutlak dibawah penanganan desa, perencanaan dan pelaksanaan dilakukan sepenuhnya oleh pengelola dan pihak desa, TNAP hanya sebagai mitra saja dan tidak memiliki kekuasaan sepenuhnya pada Ekowisata.

b. Adanya Ketidakpuasan Pihak Luar Terhadap Pengelolaan Ekowisata.

Faktor eksternal yang menjadikan pemicu adanya dinamika dalam pengelolaan Ekowisata Mangrove Bedul ini akibat adanya ketidakpuasan pihak luar terhadap Ekowisata. Ketidakpuasan diakibatkan adanya kegagalan peran pengelola yaitu dalam memberikan peringatan terhadap wisatawan sehingga mengakibatkan kejadian kematian pada wisatawan. Sehingga wisatawan yang berkunjung mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai sekarang. Penurunan kunjungan ini berdampak pula pada semakin berkurangnya pendapatan Ekowisata untuk menyuguhkan kegiatan wisata ataupun sarana dan prasarana yang mampu menarik wisatawan. Ini menjadikan masyarakat luar tidak memiliki kepuasan terhadap pengelolaan Ekowisata yang mengalami penurunan kualitas wisata. Penurunan kualitas Ekowisata menambah semakin berkurangnya kunjungan wisatawan, ini berakibat terjadi pula penurunan hasil pendapatan dari para pekerja dan karyawan. Padahal mereka juga memberikan kontribusi dana untuk Ekowisata sebagai dana kerja di Ekowisata. Dengan adanya pelayanan Ekowisata yang menurun, menambah penurunan juga kepada pengelola yang hanya bekerja di Ekowisata dan juga menurunnya wisatawan.

Adanya pertukaran sepihak yang dilakukan antara pengelola utama Ekowisata dengan pengelola yang statusnya menjadi pekerja. Pengelola yang menjadi pekerja sudah

memberikan pelayanan dan kontribusi bagi perkembangan Ekowisata, namun dengan adanya kegagalan pengelola utama menciptakan kunjungan menurun dan berakibat pula pada penurunan pendapatan pengelola tidak tetap tersebut. Sehingga mereka banyak yang keluar dan tidak bekerja di Ekowisata.

Fakta lainnya yang mempengaruhi Ekowisata adalah pertentangan antara pihak TNAP dan pengelola, ini diindikasi karena pengelolaan yang berubah menjadi ijin usaha sehingga pihak TNAP yang berada diposisi atas yang secara langsung menangani kawasan TNAP yang dijadikan Ekowisata tidak diberikan akses untuk mengelola secara keseluruhan Ekowisata seperti sebelum berubah menjadi ijin usaha. Setelah ijin usaha TNAP hanya sebagai mitra Ekowisata yang tidak memiliki kedudukan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut Ekowisata. Tetapi hanya sebagai pihak yang menetapkan regulasi. Upaya pengelolaan secara keseluruhan sepenuhnya mutlak ada pada pengelola, pihak TNAP hanya memungut dana untuk PNPB dari Ekowisata.

Dalam pandangan Blau kedua pihak antara TNAP dan pengelola pada awalnya sama-sama memberikan nilai besar pada kelompok lewat kolaborasi bersama. Namun dengan adanya ketimpangan peran yang lebih menguntungkan pihak pengelola dan juga beralihnya Ekowisata menjadi ijin usaha wisata milik desa menambah keuntungan lebih besar pada pengelola dan pemerintah desa dalam hal ini. Sehingga pihak TNAP menjadi kelompok oposisi yang menolak adanya kekuasaan pengelolaan yang berada ditangan pengelola dan pemerintah desa. Sehingga banyak isu beredar bahwa pihak TNAP menjadi pihak luar yang mengakibatkan banyaknya pengelola yang keluar dari Ekowisata.

Pertentangan antara pihak TNAP dengan pengelola ini terjadi karena ketidakkonsistenan kedua pihak dalam pembagian peran dalam pengelolaan Ekowisata. Hal ini terjadi karena perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak lebih besar dibandingkan dengan tujuan bersama. Ketidakkonsistenan menciptakan ketimpangan pembagian peran pengelolaan yang dapat dilihat dari perdebatan pihak pengelola dengan pihak TNAP dalam menetapkan kebijakan pengelolaan Ekowisata dan kegiatan pengelolaan Ekowisata. Kondisi ini berakibat pihak yang mendapatkan keuntungan lebih kecil akan menjadi oposisi yang mampu mengakibatkan perubahan bagi kelompok tersebut.

c. Pertentangan Internal Antar Pengelola Ekowisata.

Pertentangan internal terjadi karena adanya pembagian peran yang tidak sesuai. Dalam penjualan tiket Ekowisata untuk biaya naik perahu dengan sistem persewaan atau naik perahu untuk paket perjalanan panjang yang semula dikelola langsung dan ditarik oleh pengelola Ekowisata melalui loket pembayaran Ekowisata. Ini menjadi keberatan tersendiri bagi para tukang perahu karena adanya ketimpangan pembagian peran tukang perahu. Pendapatan tukang perahu diambil dari biaya wisatawan yang naik perahu, sehingga mereka menginginkan pemungutan biaya sendiri untuk paket tersebut yang selama ini perahu dengan paket panjang sering kali tidak laku, karena harga sudah ditetapkan oleh pihak Ekowisata dengan tidak adanya negosiasi harga

dengan wisatawan. Jika melalui tukang perahu akan ada negosiasi harga yang memunculkan wisatawan untuk memilih paket tersebut. Bahkan uang tiket ini dikelola oleh bagian keuangan Ekowisata sehingga seringkali hasil yang dicapai kurang maksimal. Para tukang perahu ini menuntut pembayaran tiket langsung diberikan kepada para tukang perahu setiap hari setelah Ekowisata tutup. Pembagian peran dalam pengelolaan Ekowisata yang tidak sesuai ini menciptakan menjadi sumber konflik antar pengelola Ekowisata.

Menurut Blau oposisi terhadap kekuasaan muncul, ketika mereka yang diperintah merasakan adanya eksploitasi dan penekanan. Jika seseorang penguasa memaksa bawahannya dan memanfaatkan kekuasaannya. Blau menyatakan bahwa definisi norma sosial itu tergantung atas apakah permintaan itu terlalu berlebihan dibandingkan dengan jasa yang diberikan sehingga penguasa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menggunakan kekuasaannya. Prinsip yang muncul disini adalah jika pihak yang diperintah itu merasa bahwa norma sosial itu jujur, maka mereka akan mendukung terhadap pemimpinnya, sehingga akan menguatkan dan melegitimasi kekuasaannya. Jika keuntungan itu memenuhi harapan-harapan pihak yang diperintah maka mereka akan tidak akan pernah merasa dieksploitasi dan akan mendukung legitimasi kelompok penguasa. Namun jika penguasa telah memonopoli sumber kekuasaan tidak sesuai atau melebihi norma kejujuran dan keadilan sosial maka yang diperintah akan lolos dari kekuasaan dan bahkan menentangnya. Blau juga membahas bahwa dominasi merupakan hasrat memunculkan suatu ketimpangan (Blau dalam Zeitlin, 1995:141-142).

Dengan pembagian peran yang tidak sesuai bahkan tidak menguntungkan padahal mereka sudah memberikan pelayanan untuk Ekowisata tetapi tidak memperoleh peran maksimal sebab perannya yang memungut tiket tersebut dikelola oleh pengurus BPEMB. Adanya ketimpangan peran dan menguntungkan pihak pengelola utama saja. Sehingga untuk menuntut peran tersebut mereka melakukan oposisi dengan menuntut peran tersebut, ini menciptakan adanya konflik antar pengelola dan menciptakan keluarnya anggota pengelola BPEMB. Anggota BPEMB yang keluar dari Ekowisata menyebabkan semakin berkurangnya keanggotaan BPEMB. Hal ini berdampak pada struktur BPEMB seperti terjadi pergantian dan penyusutan subbagian BPEMB, ada peran ganda di beberapa subbidang pada struktur tahun 2013, serta adanya pergantian kepemimpinan pada tahun 2011, 2012 dan 2013 dengan pergantian ketua BPEMB. Pergantian ini juga didasarkan pertentangan dan perbedaan pandangan antara anggota pengelola Ekowisata lainnya.

d. Kondisi Sosial Dan Ekonomi Pengelola Ekowisata.

Adanya penurunan kunjungan wisatawan diakibatkan pada situasi yang terjadi pada tahun 2011. Ekowisata yang semakin sepi pengunjung menciptakan berkurangnya dana operasional Ekowisata baik untuk pemberian gaji kepada pengelola ataupun untuk dana operasional pembangunan sarana dan prasarana. Dampaknya Ekowisata tidak mengalami perkembangan sarana dan prasarana untuk menarik wisatawan justru sarana dan prasarana sudah banyak yang tidak diperbaiki dan rusak. Hal ini menjadikan

banyaknya pengelola yang keluar dari Ekowisata sebab mereka tidak memperoleh gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan ini mereka memperoleh pekerjaan diluar yang lebih baik apalagi tuntutan rumah tangga yang dialami oleh pengelola menjadi faktor luar yang menuntut pengelola untuk keluar dari Ekowisata, terutama mereka yang statusnya hanya pekerja.

Blau menyatakan ada 4 kondisi yang dilakukan oleh anggota dalam kelompok atau organisasi yaitu 1)menolak untuk menerima pemberian meskipun tidak mendapatkan apa-apa, 2)berusaha memiliki sumber lain yang nilainya sama agar ada saling ketergantungan, 3)mencari alternatif lainnya sehingga ada peluang saling ketergantungan, 4)berupa kekerasan untuk memaksa atau merampas dari pihak lainnya. Jika keempatnya tidak bisa dilakukan maka pengelola yang bekerja tadi hanya akan menerima sebagai subordinat (Ritzer, 2010:369). Dari keempat situasi anggota dalam kelompok tersebut terlihat jika anggota yang hanya bekerja di Ekowisata berada pada posisi kedua yaitu berusaha memiliki sumber lain yang nilainya sama agar saling ketergantungan. Yaitu dengan bekerja di Ekowisata sebagai pihak yang dibutuhkan oleh Ekowisata seperti membuka warung dan tukang perahu. Namun ketika mereka sudah bekerja di Ekowisata dengan maksimal bahkan juga memberikan kontribusi sewa pada Ekowisata ketimpangan tetap terjadi. Pihak pengelola BPEMB tidak memberikan pelayanan sarana dan prasarana yang baru dan menarik sehingga kunjungan menurun dan pendapatan pekerja menurun. Dengan ini mereka menemukan beberapa penggantinya dan keluar dari Ekowisata (Blau mengutip Emerson, dalam Zeitlin, 1995:128). Banyaknya anggota yang keluar dari Ekowisata menjadikan struktur kepengurusan BPEMB semakin beranggotakan sedikit orang dan menciptakan berkurangnya wisatawan yang berkunjung ke Ekowisata. Dengan kondisi ini banyak pengelola yang keluar dari Ekowisata terutama mereka yang hanya bekerja di Ekowisata, semakin sepi Ekowisata menjadikan penurunan pendapatan pekerjaan pengelola. Jika kondisi dinamika pengelolaan Ekowisata terus terjadi maka akan terjadi dua kemungkinan.

Pertama, ketika dalam struktur pengelolaan Ekowisata pihak yang menduduki posisi pemimpin atau yang berada di posisi atas akan menjadi superordinat dalam kelompok, ini akan memunculkan pertukaran yang tidak seimbang. Mereka yang ada pada posisi atas dalam struktur akan menciptakan norma dan nilai sebagai alat legitimasi. Mereka akan mengontrol dan mengkoordinasi anggota-anggota lainnya yang berada dibawah. Kontrol ini dilakukan dengan memberikan ketergantungan yang besar kepada struktur bawah, disini pengelola utama Ekowisata berada diposisi atas yaitu pengurus BPEMB dan pemerintah desa akan mengontrol pengelola dibawah seperti tukang perahu dan penjual makanan karena ketergantungan ekonomi mereka pada Ekowisata. Jika tujuan yang didapat antara keduanya dianggap sama dan mampu diterima oleh anggota kelompok maka anggota kelompok menerima dengan sukarela. Maka anggota kelompok yang berada di struktur bawah mengalami posisi kepatuhan terhadap kekuasaan anggota ataupun pimpinan yang berada di atas, kondisi tersebut terjadi dengan adanya pemaksaan kekuasaan dari

atas dengan memberikna ketergantungan kepada mereka yang dibawah, meskipun pemaksaan itu tidak dilakukan secara nyata.

Pengelola yang berada pada struktur bawah dalam kelompok atapun pengelola yang ter subordinat tetap pada posisi tersebut tanpa adanya perubahan, dan ketimpangan akan terus terjadi. Keuntungan akan lebih banyak diterima bagi mereka yang berada diposisi atas atau superordinat. Akan hanya ada kontravensi sembunyi antar anggota kelompok yang berujung pada keluar dan masuknya anggota lama dan baru. Keluar dan masuknya anggota lama dan baru akan menciptakan perubahan pada pengelolaan serta akan memperhambat kinerja pengelolaan yang tidak maksimal sebab kebijakan dan program Ekowisata akan tidak konsisten karena banyak mengalami pergantian pengurus dalam BPEMB ataupun pengelola bawah.

Kedua, jika pertukaran menciptakan ketimpangan dalam kelompok yang mana hanya menguntungkan pihak pemimpin, maka akan ada penolakan dari anggota kelompok yang berada dibawah. Penolakan ini bisa dilakukan dengan kemarahan bahkan melawan mereka yang menjadi pemimpin. Setidaknya ada kekecewaan yang muncul dan bahkan jika sudah tidak teratasi akan muncul konflik dalam kelompok. Seperti yang terjadi antara pengelola utama yang berada pada kepengurusan BPEMB dengan para tukang perahu tersebut. Tukang perahu ini akan menjadi oposisi yang melawan kekuasaan yang timpang dalam kelompok, kondisi seperti ini akan menimbulkan keguncangan struktur pengelolaan Ekowisata. Jika ketimpangan terus terjadi dan semakin banyaknya pengelola maupun pihak luar yang menjadi oposisi maka akan menghancurkan struktur pengelolaan Ekowisata, karena banyaknya anggota pengelola yang keluar dari Ekowisata. Semakin sedikit pula keanggotaan pengelolaan Ekowisata akan berdampak pada kemunduran BPEMB. Keanggotaan pengelola yang bertambah sedikit akan ada kinerja pengelolaan Ekowisata menurun yang berdampak pada penurunan pula terhadap pengelolaan Ekowisata. Hal ini menimbulkan Ekowisata semakin enggan dikunjungi oleh wisatawan sebab pengelolaan yang tidak menciptakan tujuan bersama untuk meningkatkan kepariwisataan yang menarik para wisatawan. Bahkan dengan adanya pengelola Ekowisata yang keluar maka akan semakin memperburuk kinerja pengelolaan karena pengelola yang lama merupakan pengelola yang telah mendapatkan pemberdayaan dan pendidikan Ekowisata dari kolaborasi TNAP dengan desa. Jika ini terjadi Ekowisata akan mendapatkan keuntungan yang sedikit dan memberikan pendapatan yang sedikit pula pada pengelola. Pada akhirnya akan semakin banyak pengelola yang keluar dari Ekowisata. Keberlangsungan keanggotaan BPEMB yang semakin berkurang mampu membubarkan struktur tersebut dan juga mengancam perkembangan Ekowisata.

Kesimpulan

Pengelolaan Ekowisata Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) yang ada di desa Sumberasri kecamatan Purwoharjo kabupaten Banyuwangi ini dinamakan Ekowisata Mangrove Bedul. Ekowisata ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar kawasan dan juga melestarikan kawasan

TNAP dengan melibatkan seluruh stakeholder, yaitu pemerintah desa, pihak TNAP, masyarakat sekitar dan pengelola Ekowisata yang dinaungi dalam Badan Pengelola Ekowisata Mangrove Bedul (BPEMB). Dinamika pengelolaan Ekowisata meliputi 1) perubahan pengelolaan Ekowisata dari kolaborasi dengan TNAP menjadi ijin usaha wisata milik desa, 2) perubahan struktur pengelola Ekowisata Mangrove Bedul, dan 3) banyak pengelola Ekowisata yang keluar dari pengelolaan Ekowisata. Dinamika pengelolaan Ekowisata terjadi karena faktor internal dan eksternal pengelolaan Ekowisata tersebut meliputi 1) ketidak konsistenan pembagian peran dalam pengelolaan Ekowisata antara TNAP dan pengelola BPEMB, 2) adanya ketidakpuasan pihak luar terhadap pengelolaan Ekowisata, 3) pertentangan internal antar pengelola Ekowisata, dan 4) kondisi sosial dan ekonomi pengelola Ekowisata. Dengan dinamika ini akan terus terjadi keluar masuknya anggota pengelola dan mengancam pengelolaan Ekowisata karena pengelola lama adalah masyarakat yang sudah mendapatkan pemberdayaan dan pelatihan terkait pengelolaan Ekowisata yang berbasis pada konservasi. Dengan ini Ekowisata akan enggan dikunjungi wisatawan karena pengelolaan yang tidak pernah stabil dan tidak ada inovasi baru pada objek wisata, ini akan menyebabkan penurunan pendapatan dan mengancam keberlangsungan struktur BPEMB.

Ucapan Terimakasih

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal yang berjudul *Dinamika Pengelolaan Ekowisata Taman Nasional Alas Purwo (TNAP)*. Jurnal ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (SI) pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penyusunan jurnal ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Drs. Joko Mulyono, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak waktu dan perhatiannya dalam penyusunan jurnal ini;
2. Drs. Moch. Affandi, M.A, selaku dosen pembimbing akademik yang selama ini memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis;
3. Raudlatul Jannah, S.Sos. M.Si dan Drs. Sulomo, SU, yang telah memberikan kritik dan sarannya kepada penulis;
4. Nurul Hidayat, S.Sos, MUP, selaku Ketua Program Studi Sosiologi yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada penulis;
5. Dosen dan staf karyawan program Studi Sosiologi yang selama ini memberikan bimbingan bagi penulis;
6. Teman-teman Sosiologi 2009, 2008 dan 2007 yang selama ini memberikan saran, kritik dan bantuan dalam kepada penulis;
7. Rahmad Widodo yang banyak membantu penulis selama melakukan penelitian di lapangan;

8. Kepala Desa Sumberasri Bapak Drs. Suyatno, Kepala Taman Nasional Alas Purwo Resort Grajakan Bapak Syaiful, dan Ketua BPEMB Bapak Antok yang selama ini memberikan bantuan dan banyak informasi selama penelitian;
9. Seluruh Pengelola Ekowisata Mangrove Bedul dan masyarakat desa Sumberasri kecamatan Purwoharjo kabupaten Banyuwangi yang banyak memberikan bantuan dan informasi kepada peneliti selama penelitian.

Daftar Pustaka

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2004. *Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- Dwi Susilo, Rachmad K. 2009. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Keraf, Sonny. 2006. *Etika Lingkungan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Poloma, Margaret. 1992. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Purwanto, Sentot. 2011. *Dinamika Kelompok Tani Hutan Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat*. <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/47905/E11spu.pdf> [2 Agustus 2013].
- Ritzer, G dan Goodman, Douglas J. 2010. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soemarwoto, Idjah. 2001. *Atur-Diri-Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soekanto, S. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susdiyanti, Tun. 2008. *Peran Lurah Dalam Pelestarian Lingkungan*. Jurnal: Nusa Sylvania. Vol.8:36-42. <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/81083645.pdf> [20 November 2012].
- Yunita, C Siwi. 2012. *Bedul Penangkal Tsunami*. <http://sains.kompas.com/red/2012/07/06/05123280/bedul.Penamngkal.Tsunami> [13Oktober 2012].
- Zelins, M Irving. 1995. *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

